

**PANDUAN PENYUSUNAN
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
PROGRAM DIPLOMA DAN POLITEKNIK**



Disusun oleh
TIM KERJA Direktorat Pembinaan Akademik
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2006

Kata Pengantar **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Menindaklanjuti SK Mendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menerbitkan buku tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Program Diploma dan Politeknik. Buku tersebut merupakan acuan ringkas yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan sejumlah besar perguruan tinggi dalam upaya penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

Buku panduan tidak dirancang sebagai manual namun bersifat ringkas dan dimaksudkan sebagai pemberi inspirasi, motivasi, dan kepercayaan diri bahwa setiap perguruan tinggi mampu menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas dalam tingkatan dan kapasitas masing-masing.

Pengguna buku ini diharapkan dapat melakukan refleksi dan *re-invent* pada program studi masing-masing melalui *co-creation* bersama sivitas akademika dan stakeholders bersangkutan. Dengan pendekatan refleksi dan *re-invent* diyakini bahwa para pembaca yang sukses melakukan implementasi akan dikenal sebagai agen perubahan kurikulum yang memenuhi kompetensi sesuai *scientific vision* dan kebutuhan pasar.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya mengenai perbaikan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Walaupun masih banyak kekurangan dalam buku ini, namun diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat. Kritik dan saran diharapkan dalam rangka perbaikan pada penerbitan yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh stakeholders.

Jakarta, Desember 2006
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brojonegoro

Kata Pengantar **Direktur Pembinaan Akademik**

Pada Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Koordinator Kopertis tahun 2004, telah disebarkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Program Diploma dan Politeknik. Pada tahun 2006, beberapa orang Tim Penyusun telah berupaya mensosialisasikannya melalui forum seminar, pelatihan dan lokakarya di beberapa perguruan tinggi dan program studi. Masukan-masukan dari para pendidik ditampung, didiskusikan dan akhirnya memberikan pengkayaan pada, sehingga terbitlah buku Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Program Diploma dan Politeknik. Beberapa penjelasan lebih rinci telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya perbaikan kurikulum. Untuk ini, pokok-pokok informasi penting tentang kedua hal tersebut muncul di dalam beberapa bab termasuk pengkayaan ilustrasi praktek baik.

Buku ini berisi empat bab yang dimulai dengan hal yang melatar belakangi perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke KBK. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan implementasi dan evaluasi KBK di program diploma dan politeknik.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang realistik tentang KBK di program diploma dan politeknik. Kritik dan saran diharapkan dalam rangka perbaikan pada penerbitan yang akan datang. Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2006
Direktur Pembinaan Akademik

I. Tresna Dermawan Kunaefi

Tim Penyusun

Iwan Tresna DK (Ditjen Dikti)
Sudjarwadi (UGM)
GM Arief Djauhari (Ditjen Dikti)
SP Mursid (Polban)
Ludfi Djajanto (Poli Neg. Malang)
Sylvi Dewayani (UGM)
Illah Sailah (IPB)
Endrotomo (ITS)
Sarjadi (Undip)
Ida Malati (UT)
Balza (UGM)
Hanafi (Ditjen Dikti)
Firdaus (Ditjen Dikti)
Nurmansyah (Ditjen Dikti)
Sunarto (Ditjen Dikti)
Rivera Soedjito (Ditjen Dikti)
Titi Gunarti (Ditjen Dikti)
Meliana (Ditjen Dikti)
Hasmi Musa (Ditjen Dikti)
Evi Susanti (Ditjen Dikti)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pendidikan Tinggi Program Diploma dan Politeknik
- 1.3. Pendidikan Vokasi/Profesional
- 1.4. Implementasi KBK pada Pendidikan Vokasi/profesional

BAB II KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

- 2.1. Kurikulum Pendidikan Tinggi Menurut Peraturan
- 2.2. Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi
- 2.3. Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Pendidikan Vokasi/Profesional

BAB III MENYUSUN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PADA PENDIDIKAN VOKASI/PROFESIONAL

- 3.1. Alur Penyusunan Kurikulum
- 3.2. Pembagian Kompetensi
- 3.3. Elemen Kompetensi
- 3.4. Kompetensi Pendidikan Vokasi/profesional
- 3.5. Menyusun kompetensi
- 3.6. Teknik Dacum
- 3.7. Menyusun KBK pada Pendidikan Program Diploma dan Politeknik

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI/PROFESIONAL

- 4.1. Implementasi KBK
- 4.2. Evaluasi

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia belum memiliki budaya yang panjang. Dimulai pada masa akhir penjajahan Belanda, pendidikan tinggi hanya dimaksudkan untuk menghasilkan dokter pribumi dengan jumlah mahasiswa sangat terbatas. Budaya pendidikan tinggi nampaknya baru dimulai tahun 1945 saat kemerdekaan, namun sejak itu, pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk melayani jumlah peserta didik yang sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahun dengan populasi di atas 230 juta orang.

Pemenuhan pada tuntutan kuantitas nampaknya belum dapat diimbangi dengan kualitas. Mutu rata-rata pendidikan tinggi di Indonesia sejauh ini masih sangat memprihatinkan. Walaupun demikian, perlu diberikan apresiasi positif bahwa sistem pendidikan di Indonesia secara terus menerus dikembangkan dalam segala aspeknya. Perangkat hukum yang memayungi sistem pendidikan di Indonesiapun terus menerus diperbaharui dengan penyesuaian pada paradigma terakhir. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dapat dijadikan indikator adanya usaha tiada henti dari pengembangan pendidikan di Indonesia. Kita pantas berbesar hati dan terus menerus menjaga semangat berkembang tersebut.

Khusus pada pendidikan tinggi, peningkatan kualitas nampaknya menjadi isu penting yang semakin relevan. Bagaimana bentuk sistem pendidikan tinggi di Indonesia dalam konstelasi pendidikan nasional dikerangkai dalam UU.

Merujuk pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional :

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (Pasal 19, Ayat 1)
2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka
3. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (Pasal 20, ayat 1)
4. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi/profesional.

Hal baru yang perlu mendapatkan catatan adalah munculnya istilah *vokasi/profesional dan profesi* dalam konstelasi pendidikan tinggi di Indonesia. Setiap istilah baru tentulah akan membawa konsekuensi dan implikasi pada keseluruhan konstelasi pendidikan tinggi. Aspek pengembangan dan pembinaan pendidikan tinggi akan turut dipengaruhi dengan bergesernya paradigma yang dipergunakan pada UU pendidikan yang baru. Menyikapi pergeseran paradigma pada UU tersebut, secara hati-hati perlu disusun gugus pemikiran yang elaboratif terhadapnya.

Setiap penyelenggara pendidikan tinggi memiliki kesamaan derajat dalam bentuk institusi perguruan tingginya. Satu perguruan tinggi bukan merupakan kelanjutan dari perguruan tinggi lainnya. Hal ini terlihat dari adanya tafsiran yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan diploma, demikian juga institusi politeknik dan akademi yang menyelenggarakan, dijadikan perantara untuk mencapai pendidikan sarjana pada universitas atau institut. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk tujuan mengembangkan potensi peserta didik setelah mendapatkan landasan pendidikan dari jenjang pendidikan menengah.

Dengan pemahaman bahwa setiap perguruan tinggi memiliki derajat, fungsi dan pekerjaan yang setara, maka pengakuan, penghargaan dan penamaan pada setiap unsur civitas akademika untuk fungsi dan pekerjaan yang sepadan adalah sama (program diploma sederajat dengan pendidikan sarjana). Perbedaan antara satu institusi perguruan tinggi dengan yang lainnya adalah pada substansi akademik yang diselenggarakan sesuai kekhasan perguruan tingginya (Politeknik sederajat dengan Universitas maupun PT lainnya).

Beragamnya bentuk perguruan tinggi di Indonesia semestinya dapat menyusun kekhasan peran masing-masing dalam mengelola kekayaan sumber daya bangsa dan potensi alam Indonesia yang kaya raya. Untuk itu perlu terus-menerus mengkaji dan mengembangkan pendidikan tinggi (khususnya *vokasi/profesional dan profesi*) dengan mengenali kekhasannya dan peluangnya untuk berperan dalam menyiapkan pengelola dan metode pengelolaan potensi sosiologis, ekonomis, ekologis dan geografis bangsa Indonesia sehingga semakin berdaya dan mampu berperan dalam tataran dunia.

1.2. Pendidikan Tinggi Program Diploma dan Politeknik

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia, merujuk pada Pasal 15 UU No.20 Tahun 2003, mengenal lima jenis pendidikan, yakni jenis pendidikan akademik, profesi, *vokasi/profesional*, keagamaan, dan khusus. Dimana program pendidikannya meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

Sedangkan institusi pendidikan tinggi adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas yang kesemuanya disebut perguruan tinggi.

Semua jenis perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program diploma, sedangkan program sarjana, magister, profesi, dan doktor hanya dapat diselenggarakan pada universitas, institut dan sekolah tinggi. Politeknik hanya menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi/profesional dalam bentuk program diploma.

Merujuk pada data tahun 2001, diperoleh angka jumlah institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia sebanyak 2012 PT. Jumlah keseluruhan mahasiswa yang dapat ditangani mencapai 3,5 juta, sehingga rata-rata setiap perguruan tinggi hanya menangani kurang-lebih sekitar 1500 mahasiswa saja.

Lebih khusus lagi, ada sekurangnya 2725 program studi diploma yang tersebar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan saat ini jumlahnya terus berkembang. Dari jumlah program studi diploma tersebut, 464 ada pada perguruan tinggi negeri, 2013 berada di perguruan tinggi swasta, dan sisanya 248 program studi diploma berada di perguruan tinggi keagamaan dan kedinasan. Sebagai perbandingannya terdapat 6379 program studi S1 dan 391 program studi S2.

Khusus politeknik, terdapat sedikitnya 26 politeknik negeri yang menyelenggarakan program diploma, dan sekurangnya 47 politeknik swasta yang ada di Indonesia saat ini. Jumlah tersebut belum termasuk politeknik kesehatan yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak dari politeknik negeri. Jika ditinjau dari jumlah program studi diploma yang ada dibandingkan dengan jumlah program studi S1 & S2, nampaknya belum terjadi perimbangan yang sehat, sehingga usaha pengembangan dalam kuantitas, tanpa mengabaikan kualitas, masih perlu diusahakan.

Indikator kinerja sistem pendidikan tinggi dapat juga dipergunakan untuk memberikan gambaran dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan program diploma. Dari efisiensi internal yang diukur berdasarkan prosentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi tepat waktu, efisiensi program diploma baru mencapai 63,39%.

Perbandingan antara program studi eksakta dan non-eksakta juga masih timpang yakni 1:2 (target 1:1), pengembangan program studi eksakta menjadi prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Kepmen Diknas No. 234/U/2000 tentang pembukaan program studi baru.

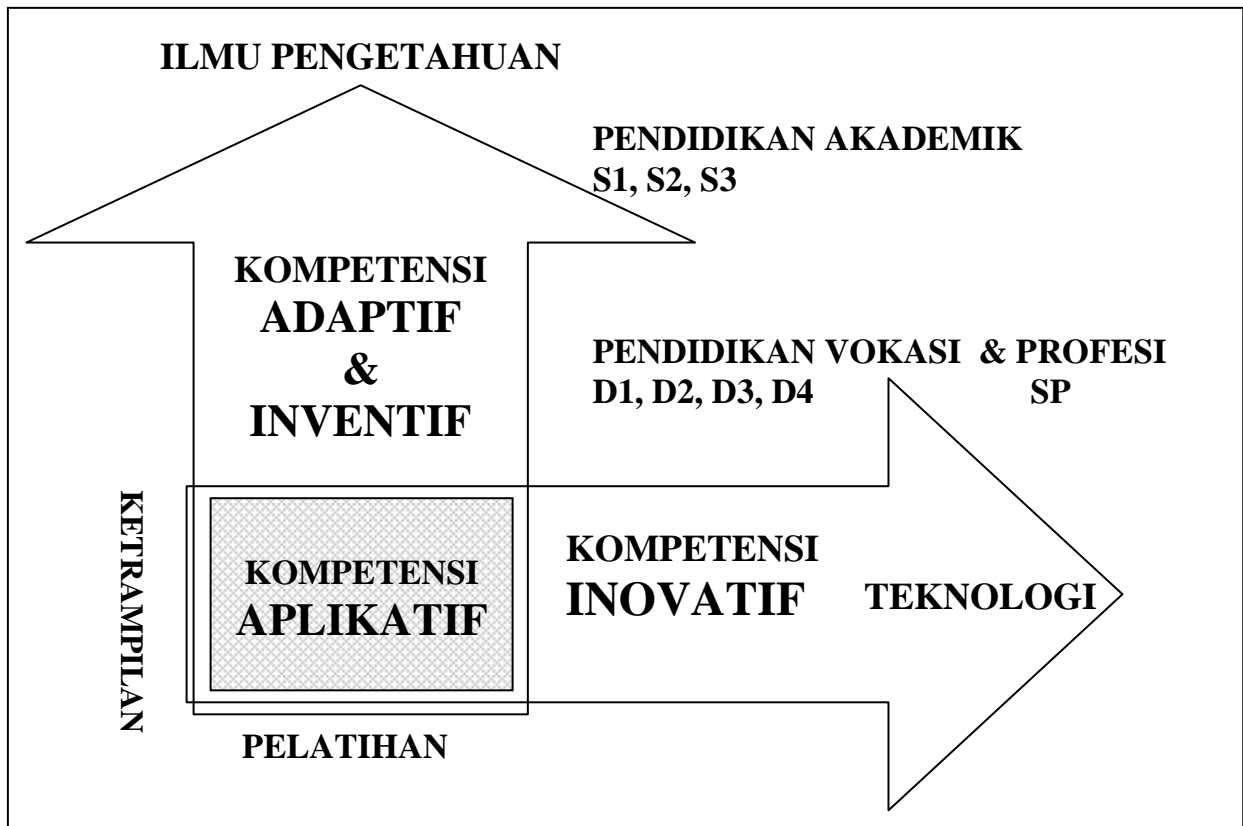
Produktivitas program diploma, yang diukur dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah mahasiswa mendaftar adalah 30,80% untuk PTN dan 25,50% untuk swasta. Angka prosentase tersebut tentunya masih perlu secara terus-menerus ditingkatkan.

Beberapa indikator kinerja lainnya, secara umum, nampaknya masih memerlukan usaha untuk secara berkelanjutan ditingkatkan kearah perbaikan dan kemajuan. Kurikulum merupakan peluang besar untuk menjadi faktor pembawa kemajuan dalam sistem pendidikan program diploma dan kepoliteknikan.

1.3. Pendidikan Vokasi/Profesional

Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan tiga jenis pendidikan tinggi di Indonesia, yakni pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi/profesional. Pendidikan vokasi/profesional diselenggarakan di perguruan tinggi dalam bentuk program pendidikan diploma yang mencakup diploma satu (DI), diploma dua (DII), diploma tiga (DIII), dan diploma empat (DIV). Seluruh bentuk perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi/profesional, hanya akademi dan politeknik yang melulu menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi/profesional.

Kekhasan pendidikan vokasi/profesional dapat diperlihatkan dengan Gambar 1.1 yang menjelaskan kaitan antara kompetensi alamiah dari jenis pendidikan akademik, vokasi/profesional maupun profesi, dan pelatihan.



Gambar 1.1. Vektor Kompetensi Jenis Pendidikan Tinggi

Pendidikan akademik lebih mengutamakan pada arah kompetensi adaptif dan inventif untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, sementara pendidikan vokasi/profesional (juga pendidikan profesi) lebih mengutamakan pada arah kompetensi inovatif untuk menghasilkan teknologi. Semua jenis pendidikan pada prinsipnya memiliki kompetensi aplikatif pada porsi lebih kecil. Jika hanya penguasaan pada kompetensi aplikatif, sesungguhnya tidak lagi dapat disebut sebagai pendidikan tinggi, namun lebih sebagai pelatihan atau training.

Dalam Kepmen Diknas No. 232/U/2000 istilah pendidikan vokasi belum dikenal dan masih menggunakan istilah tunggal yakni pendidikan profesional. Menurut kepmen tersebut, pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pendidikan vokasi/profesional dikembangkan di Indonesia untuk memainkan peranan khusus dalam sistem pendidikan tinggi. Ciri yang umum dari pendidikan tinggi vokasi/profesional ialah membekali peserta didik dengan dasar-dasar akademik yang diikuti dengan pengembangan kemampuan inovatif di berbagai bidang, baik di bidang keilmuan maupun di bidang profesi. Pendidikan vokasi/profesional secara khusus ditekankan pada pengembangan kemampuan menerapkan dan menginovasi teknologi secara praktis dan kemahiran menangani pekerjaan secara vokasi/profesional di tingkat pelaksanaan.

Pendidikan Program Diploma merupakan jalur pendidikan vokasi/profesional (dalam Kepmen Diknas 232/U/2000 masih disebut sebagai pendidikan profesional) yang proses pendidikannya diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu (PP 60 tahun 1990, Ps 4 ayat 4). Selanjutnya dijelaskan lebih luas pada Kepmen Diknas No. 232/U/2000 tentang tujuan pendidikan program diploma yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Antara pendidikan akademik dan vokasi/profesional tidak sepenuhnya dapat ditarik batas yang tegas untuk membedakannya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin terintegrasi di dalam berbagai bidang terapan. Namun demikian sebagai arahan untuk menyusun kurikulum, dapat dirumuskan pokok-pokok yang menjadi **ciri pendidikan vokasi/profesional** sebagai berikut:

- Pendidikan vokasi/profesional adalah pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dengan penekanan pada kompetensi inovatif selain dasar aplikatif, dan sebagian kompetensi adaptif maupun inventif.
- Pendidikan vokasi/profesional adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktik-praktik yang diakui dengan baik, dalam bidang tertentu.
- Dalam proses belajar mengajar, pelajaran teori dan praktik diselenggarakan untuk saling memperkuat kemampuan penalaran dan ketrampilan menangani masalah praktis.
- Pengajaran teori menekankan pada pengkaitan konsep-konsep dasar dengan kasus-kasus nyata secara langsung melalui metoda pemecahan masalah praktis.
- Pengajaran praktik menekankan pada kemahiran mengintegrasikan teori pada penanganan proses-proses nyata yang menghasilkan produk jadi.

Dengan dasar demikian, program pendidikan vokasi/profesional akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kesiapan untuk secara luwes menyesuaikan diri dengan pekerjaan jabatan baru di bidang yang menjadi profesinya.

Tujuan umum pendidikan vokasi/profesional diselenggarakan terutama untuk mendukung pengembangan industri baru dan memperbaiki mutu industri yang sudah ada, sekaligus membuat inovasi pada kekayaan sumber daya dan sumber alam bangsa yang khas melalui pengadaan sumber daya manusia yang dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan teknologi. Juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan bidang kerja tertentu di industri maupun bidang pekerjaan baru yang dimasukinya. Sedangkan tujuan khusus pendidikan vokasi/profesional adalah:

- Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di bidangnya secara mandiri dan kreatif dalam semua sektor industri yang menggunakan berbagai teknologi dari yang sederhana sampai yang modern dan lebih tinggi.
- Mengembangkan hubungan yang erat dengan industri untuk mendapat kesesuaian antara kebutuhan ketrampilan di industri dengan program pendidikan yang diselenggarakan.
- Mengembangkan hubungan yang erat antara lembaga penyelenggara Program Diploma, industri dan masyarakat luas pada umumnya.
- Melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan dan meluaskan konsep dan pengetahuan yang menunjang kemungkinan praktik-praktik yang berlaku.

Bersepadan dengan tujuan tersebut, pendidikan program diploma dan politeknik diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi tertentu dalam jumlah yang sesuai dengan tenaga kerja yang diperlukan, untuk itu kemampuan dari hasil pendidikan program diploma dan Politeknik mempunyai ciri antara lain :

- Memiliki pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan inovasi yang cukup untuk mempraktekan profesinya.
- Memiliki pengetahuan yang cukup luas pada masalah sosial untuk meletakkan praktek profesionalnya dalam konteks kemasyarakatan dan untuk menyediakan profesional leadership.
- Berkembangnya karakteristik kepribadian untuk bekerja secara efektif.
- Semangat terus belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesinya.
- Mampu melaksanakan dan menginterpretasikan hasil riset yang akan menambah pengetahuan manusia.

Kualitas dan ketepatan output dari pendidikan vokasi/profesional (program diploma dan kepoliteknikan) pada akhirnya sangat tergantung pada

keseluruhan proses secara komprehensif dalam mekanisme sistem pembelajaran, yang mencakup di dalamnya adalah :

- Kurikulum
- Metode pembelajaran
- Ketepatan pelaksanaan program
- Dukungan sumber daya manusia berkualitas
- Fasilitas yang memadai
- Maupun kemampuan monitoring dan evaluasi yang presisi dan konsekwen

1.4. Implementasi KBK pada Pendidikan Vokasi/profesional

Salah satu implementasi paradigma Baru di Perguruan Tinggi adalah perubahan kurikulum dari *content-based* ke *competent-based* seiring dengan tuntutan perubahan zaman serta sinyal pasar kerja (*labor-market signals*). Sebagai pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi telah diterbitkan Kepmen Diknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan terhadap para pimpinan PT, dosen serta mahasiswa tentang apa dan mengapa KBK menjadi pilihan kurikulum di PT untuk menggantikan kurikulum tahun 1994 yang dituangkan dalam SK. Mendikbud No. 056/U/1996. Sosialisasi dalam bentuk rancangan telah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi (Rakernas-PPT) 1998/1999, dan implementasinya telah dibahas dalam Rakernas-PPT 1999/2000. Meskipun demikian, hingga akhir batas waktu yang ditentukan untuk implementasi KBK di PT Indonesia yaitu tanggal 20 Desember 2002, ternyata belum ada PT, yang terpilih sebagai sampel, dalam kajian yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Inventarisasi dan Evaluasi Implementasi KBK di PT tahun 2003 yang telah merekonstruksi dan mengimplementasikan KBK sesuai dengan harapan.

Tantangan utama yang ditemui di lapangan dengan belum dilaksanakannya Kepmen Diknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 adalah berkaitan dengan masih beragamnya tingkat pemahaman dan penilaian arti penting oleh pimpinan PT, dosen dan mahasiswa, terhadap makna dan bagaimana menyusun KBK dengan benar. Oleh karena itu sangatlah wajar jika implementasi KBK di PT juga masih belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan di tahun 2003, diperoleh data bahwa pemahaman terhadap KBK masih berbeda-beda dan kesiapan untuk melakukan perubahan kurikulum di PT juga berbeda. Sampai akhir tahun 2006, khusus untuk KBK pada pendidikan program diploma dan kepoliteknikan belum ada usaha terstruktur untuk mendukung penyelenggaraan KBK secara konsisten.

Menyikapi hasil kajian tersebut maka penulisan buku penjelasan sebagai bahan acuan dalam sosialisasi dan implementasi KBK di program diploma ini dipandang sangat perlu untuk memandu para pelaku rekonstruksi kurikulum

agar pelaksanaan Kepmen Diknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 dapat terselenggara secara efektif. Buku Diskusi Seputar KBK ini berisi tentang beragam wacana yang acapkali muncul di kalangan pendidik dan pengajar dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kurikulum.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1. Kurikulum Pendidikan Tinggi Menurut Peraturan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 1 butir 6).

Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai pembelajaran yang nyata pada pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:

- Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama
- Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, komplementer dengan Kurikulum Inti, disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. **(SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 7)**

Dep Diknas khususnya Ditjen Dikti **tidak** mengeluarkan Kurikulum Nasional, namun mengeluarkan **pedoman umum** dalam penyusunan kurikulum bagi setiap program studi yang ada di PT di seluruh Indonesia dalam bentuk SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan dilanjutkan dengan SK Mendiknas No. 045/U/2002. Semangat dari Kepmen tersebut adalah untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan berkreasi bagi setiap PT dalam mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan minat dan kemampuan penyelenggaraannya. Setiap program studi dapat mengeksplorasi dan mengeksplorasi seluruh potensi dirinya agar menjadi yang terbaik.

Rambu-rambu kurikulum inti PT dikeluarkan dalam bentuk SK Mendiknas 045/U/2002. Dengan rambu-rambu tersebut setiap perguruan tinggi (PT) memiliki pola dan patokan yang terukur serta dapat didiskusikan antar *peer groups*, sehingga masing-masing PT dapat menonjolkan keunggulannya, namun tetap disertai tanggung jawab khususnya pada *stakeholder*-nya.

Kurikulum pendidikan tinggi khususnya pendidikan vokasi/profesional (diploma dan kepoliteknikan) dengan merujuk pada kedua Kepmen di atas setidaknya mengandung pengertian mengenai komponen kurikulum sebagai berikut :

- Adanya seperangkat materi kajian sebagai isi dari serangkaian matakuliah (*contents*)

- Terorganisasikannya pengalaman belajar yang berfungsi memberi kemudahan pencapaian tujuan oleh mahasiswa
- Adanya tujuan belajar yang dirumuskan sebagai kriteria untuk mengukur kompetensi yang telah dicapai mahasiswa
- Adanya pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang memberi suasana untuk tumbuhnya proses belajar yang bermakna (dengan memanfaatkan beragam sarana belajar, beragam metode dan media pembelajaran serta beragam potensi kecerdasan mahasiswa).

Secara lebih mendasar, kurikulum pendidikan tinggi termasuk di dalamnya pendidikan vokasi/profesional dan profesi, merupakan landasan yang mencakup segenap aspek dari perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Kurikulum pendidikan tinggi yang selanjutnya lebih dikenal sebagai KBK bukan lagi sekedar sederetan daftar mata kuliah, namun merupakan nafas dari penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri.

2.2. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain sebagai *a method of inquiry* yang diharapkan. Yang dimaksud dengan *method of inquiry* diantaranya adalah suatu metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu, meningkatkan kemampuan untuk menggunakan atribut kompetensi guna menentukan pilihan jalan berkehidupan di masyarakat, meningkatkan cara belajar sepanjang hayat (*learning to learn* dan *learning throughout of life*)

Ciri KBK adalah :

- Teridentifikasi profil lulusan dalam perannya pada masyarakat.
- Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta didik sebagai luaran proses pembelajaran.
- Materi ajar dan proses pembelajaran didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi dan berfokus pada minat peserta didik.
- Lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik dan afektif.
- Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk berkreasi secara prosedural atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar pula¹⁾ ;

¹⁾ *A Taxonomy for Learning, teaching, and Assessing* (2001). Orin W. Anderson dan David R. Krathwohl eds. Pearson Education Publisher. 302 hal.

- Disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan lulusan pendidikan tinggi (masyarakat profesi dan pengguna lulusan).

2.3. Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Pendidikan Vokasi/Profesional

Merujuk pada SK Mendiknas No. 232/U/2000, secara kuantitatif kurikulum pada pendidikan program diploma (pendidikan vokasi/profesional) dapat diwakili melalui pernyataan pada Pasal 6 : Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. Pada pasal yang sama diberi penjelasan yang setara mengenai program diploma I, II, dan IV. Sedangkan pada Pasal 8 diberikan penjelasan bahwa : Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma.

Spesifikasi bersifat kuantitatif tersebut sesungguhnya kurang memberikan gambaran jelas mengenai sosok KBK pada program diploma dan institusi kepoliteknikan. Namun jika merujuk pada Gambar 1.1. Vektor Kompetensi Jenis Pendidikan Tinggi, karakteristik dari kurikulum dan substansi pada pendidikan program diploma menjadi lebih jelas. KBK pada pendidikan program diploma memiliki penekanan pada kemampuan (kompetensi) inovatif. Bahan kajian dan pelajaran pada pendidikan program diploma hendaknya dapat memberikan cukup landasan bagi lulusan untuk mengembangkan teknik atau cara-cara yang efektif dan efisien dalam memberikan solusi pada soal dan tantangan kehidupan. Dengan demikian bahan kajian dan pelajaran harus diekstrak dari persoalan dan tantangan nyata saat ini dan peluang masa mendatang.

Ciri khas yang juga tidak kalah penting pada KBK di pendidikan program diploma adalah kemampuan untuk secara jelas mendiskripsikan profil lulusan yang cocok dengan profesi yang eksis saat ini dan peluang akan kehadirannya di masa depan. KBK pada pendidikan program diploma cenderung merupakan respons pada kebutuhan kompetensi profesi yang telah eksis dan berkembang di masyarakat. Pendidikan program diploma tidak menitik beratkan dalam menciptakan profesi baru dan ilmu baru. KBK pendidikan program diploma disusun bersama dengan sejawat dan masyarakat relevan, profesi, dan pengguna lulusan.

Gagasan bahwa perbandingan komposisi praktek dibanding teori pada kurikulum pendidikan program diploma sebagai indikator saat ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan. Persyaratan bahwa prosentase praktek lebih besar dari teori tidak selalu tepat untuk dijadikan ciri khas KBK diploma. Pada

inovasi teknologi dan pemanfaatan teknologi maju yang intensif ilmu pengetahuan, dapat saja dibutuhkan pembekalan teori yang berimbang atau bahkan lebih besar dibanding praktek. Dapat juga dikembangkan pemikiran bahwa pada pendidikan program diploma setiap praktek selalu didukung dengan teori yang relevan, dibandingkan dengan pendidikan akademik dimana teori dibuktikan melalui praktek.

KBK pada pendidikan program diploma harus dapat menunjukkan parameter dan indikator pengukur ketercapaian keahlian dan kemampuan penerapan maupun inovasi teknologi.

BAB III

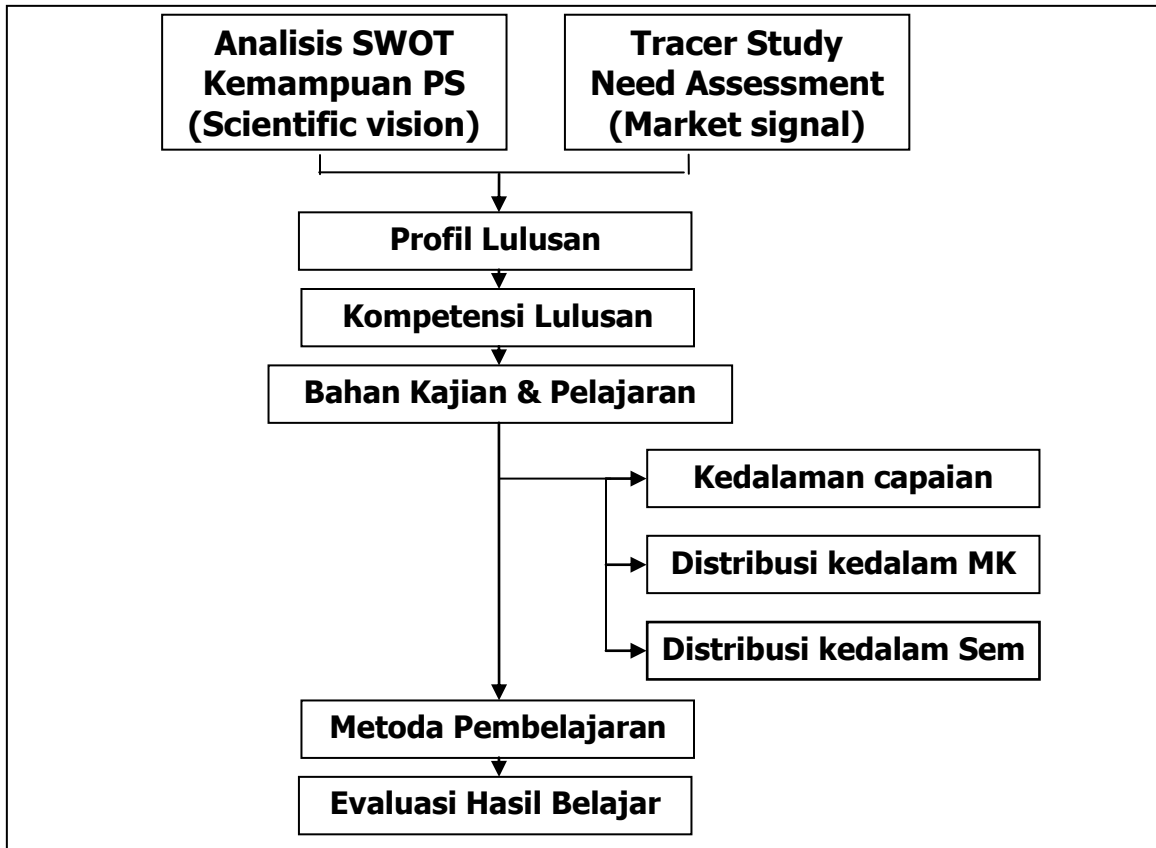
MENYUSUN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PADA PENDIDIKAN VOKASI/ PROFESIONAL

3.1. Alur Penyusunan Kurikulum

Ada dua cara menyusun kurikulum. Pertama kurikulum disusun oleh satuan penyelenggara pendidikan (dalam hal ini PS) bersama-sama dengan sejawat (peer group) dan stakeholder dengan status dosen sebagai implementor kurikulum. Ke dua, kurikulum disusun oleh dosen PS juga dengan melibatkan sejawat dan stakeholder. Langkah-langkah penyusunan kurikulum berikut merupakan jalan tengah, yaitu dosen sebagai bagian dari PS dikoordinasi oleh PS bersangkutan, menyusun kurikulum dengan melibatkan sejawat dan stakeholder.

Ada tujuh langkah dalam pengembangan kurikulum yaitu :

1. menyusun **profil lulusan** berdasar pada profesi yang eksis dan berkembang di masyarakat;
2. perumusan **kompetensi** yang mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain;
3. menjabarkan dalam **elemen kompetensi** dengan mempertimbangkan kemampuan inovatif dan pengembangan teknik menyelenggarakan pekerjaan secara efektif dan efisien;
4. penyusunan **bahan kajian dan pelajaran** untuk mencapai elemen kompetensi yang telah dibuat.
5. dilanjutkan dengan **mengelompokkan bahan kajian dalam struktur** yang berurut dan bersepadan untuk menyusun strategi pembelajaran;
6. penyusunan mata ajaran, yaitu penyusunan mata ajaran dengan mempertimbangkan kedalaman capaian pembelajaran, materi ajar dan keterkaitan antar mata ajaran untuk mencapai kompetensi yang telah direncanakan ;
7. penyusunan cara atau metode pembelajaran dan evaluasi hasil



Gambar 3.1. Urutan Pengembangan KBK Diploma

3.2. Pembagian Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai **syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat** dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu²⁾. (SK Mendiknas No. 045/U/2002, Ps. 21).

Pembagian kompetensi dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi meliputi:

²⁾ Kompetensi sebagai terjemahan dari *competency* (Inggris), sebagai kata benda dalam bentuk jamak. Orang yang memiliki kompetensi disebut sebagai orang yang kompeten, terjemahan dari *competent* (Inggris) sebagai kata sifat (ajektif). (2003 Merriam-Webster, Incorporated). Kompetensi diartikan pula sebagai diskripsi pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan ketrampilan dan perilaku agar seseorang dapat berperan secara efektif. Dalam hal ini dibedakan antara kompetensi utama (*core competencies*) yang diperlukan dalam “*all role profiles*”, dan kompetensi khas yang diperlukan dalam “*some role profiles*” (www.mcgill.ca/hr/mcompensation/terms/). Persyaratan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan (*ability*) dan karakteristik yang berkaitan dengan kinerja tinggi dalam melakukan pekerjaan merupakan persyaratan kompetensi. Bahkan beberapa kompetensi mencakup motivasi, *beliefs*, dan nilai. (www.umich.edu/~hrra/hra/glossary.htm).

- **Kompetensi Utama** ialah kemampuan peserta didik untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan atau profesi utama sesuai dengan hasil proses pendidikan di suatu program studi.
- **Kompetensi Pendukung** ialah kemampuan seseorang peserta didik untuk mendukung penampilan kinerja pada Kompetensi Utama dalam suatu kondisi pekerjaan tertentu.
- **Kompetensi Lain** ialah kemampuan peserta didik yang bersifat khusus dan mampu meningkatkan kualitas hidup dengan kekhasan yang berbeda dengan Kompetensi Utama maupun Kompetensi Pendukung.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembagian kompetensi tersebut, yaitu :

- memberikan kemampuan adaptasi terhadap ketidakpastian lapangan kerja, sifat pekerjaan, dan perkembangan masyarakat yang semakin tidak menentu (dari *terra forma* ke *terra incognita*);
- untuk mengantisipasi pekerjaan dengan persyaratan kompetensi yang sifatnya kompetitif, inovatif dan tidak mengenal batas-batas fisik wilayah, negara, dan pemerintahan;
- untuk memfasilitasi proses pendidikan sepanjang hayat, dalam bentuk proses belajar menemukan *a method of inquiry* seseorang.

3.3. Elemen Kompetensi

Rincian dari Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lain berupa lima elemen kompetensi.

Elemen-elemen kompetensi pendidikan tinggi yang dimaksud dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 terdiri atas :

- landasan kepribadian;
- penguasaan ilmu dan keterampilan;
- kemampuan berkarya;
- sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

3.4. Kompetensi Pendidikan Vokasi/profesional

Kompetensi pada pendidikan vokasi/profesional menyangkut kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu bidang kerja tertentu dan kemampuan untuk mengembangkan teknologi, termasuk di dalamnya:

- o kemampuan menerapkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan ke dalam situasi yang berbeda-beda atau baru dalam bidang tertentu tersebut;
- o kemampuan merencanakan dan mengorganisir pekerjaan, inovasi dan kemampuan melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak rutin;
- o kualitas personal yang dibutuhkan untuk bekerjasama dengan rekan sejawat, bawahan, pimpinan, serta berhubungan baik dengan pihak luar.

Rujukan kompetensi untuk masing-masing jenjang pendidikan diploma pendidikan vokasi/profesional dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenjang	Beban studi dan Kompetensi
Diploma III	<p>adalah jenjang pendidikan vokasi/Profesional yang mempunyai beban studi minimal setara dengan 110 SKS dan maksimal 120 SKS dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi maksimum 10 semester. Lulusan D-III kompeten dalam keterampilan yang membutuhkan kemampuan dalam bidang kerja yang lebih luas, lebih kompleks dan lebih bersifat tidak rutin jika dibandingkan dengan tenaga kerja pada level D-III. Dalam hal ini akan dibutuhkan keterampilan manajerial.</p>
Diploma IV	<p>adalah jenjang pendidikan vokasi/Profesional yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Program diploma IV ini diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.</p> <p>Saat ini pendidikan vokasi/ professional untuk jenjang Diploma Empat (D IV) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari pihak pengguna lulusan sehingga kompetensi lulusannya disesuaikan dengan kebutuhan pihak pengguna tersebut.</p>

3.5. Menyusun kompetensi

Pada prinsipnya kompetensi disusun oleh masyarakat pemangku kepentingan lulusan (hasil didik) yang terinstitusi berdasarkan kebutuhan atau tuntutan kemampuan di masyarakat. Masyarakat terinstitusi tersebut mewakili kebutuhan masyarakat profesi (*professional needs*), masyarakat industri/bisnis (*industrial/business needs*) maupun masyarakat luas (*societal needs*).

Adapun prinsip penyusunan kompetensi meliputi: (i) mengantisipasi bidang kerja/kehidupan yang kemungkinan berubah pada 4-5 tahun ke depan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi profil lulusan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, (ii) mengacu pada standard kompetensi dari pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan masukan, (iii) memungkinkan lulusan untuk mengembangkan diri dengan kemampuan generiknya (memiliki *generic skills*), selain kemampuan di bidang studinya.

a. *Scientific Vision dan Market Signal*

Merumuskan *scientific vision* dapat dilakukan melalui diskusi pakar/pengajar dalam sebuah forum komunikasi baik formal maupun *informal* yang berulang-ulang sampai disepakati prediksi profil lulusan dan kompetensi yang mendukungnya di masa yang akan datang. Pertimbangan kemajuan ilmu dan teknologi 10-20 tahun ke depan mendominasi pemikiran ini. Disarankan melalui pemikiran pakar yang dituangkan dalam penyusunan *scientific vision* sekaligus membangun keberanian pakar untuk menjadi *trend setter* perkembangan ipteks, sehingga dapat saja menjadi penentu pasar.

Market signal diperoleh dengan cara jajak pendapat (*tracer study*) menggunakan alat bantu kuesioner yang teruji dari para pengguna lulusan (*users*) dan alumni serta asosiasi profesi dan wakil masyarakat lainnya yang relevan . Biasanya *tracer study* ini dapat juga digunakan untuk melihat tingkat relevansi antara kurikulum dengan dunia kerja (*job description* dan *job analysis*).

Hasil pemikiran faktual dari para pakar terhadap *market signal* diformulasikan untuk dapat mengetahui *forward outlook* dari kompetensi kebutuhan pengembangan bidang kehidupan. *Forward outlook* kompetensi pekerjaan ini kemudian dikonfirmasi dengan informasi terdokumentasi, untuk selanjutnya dicarikan arah pengembangan IPTEK (juga kesenian) kedepan dalam bentuk tataran *state of the art* IPTEK yang bersangkutan, dan *outlook* kompetensi. Setelah dikonfirmasi dengan para pengguna dan alumni serta asosiasi profesi, maka tersusunlah formulasi kompetensi untuk suatu pekerjaan tertentu. Status kompetensi yang akan dituju dengan rancangan KBK (kompetensi utama,

kompetensi pendukung, atau kompetensi lainnya) ditentukan oleh penyelenggara PS yang bersangkutan.

b. Peran Asosiasi dan Sertifikasi Profesi

Setidaknya dalam menyusun KBK di pendidikan program diploma akan mengenal dua jenis asosiasi, yakni asosiasi profesi dan asosiasi industri. Keduanya dapat saling mendukung atau melengkapi dan harus dilibatkan dalam penyusunan KBK khususnya selama mengidentifikasi profil dan memetakan kompetensi dari lulusan.

Asosiasi profesi dan asosiasi industri harus turut bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan dengan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya proses pembelajaran yang memberdayakan. Peran utama dari asosiasi profesi dan asosiasi industri adalah dalam memberikan daftar standar kompetensi yang berlaku saat itu. Standar kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lain pada KBK pendidikan program diploma.

Rujukan satandar kompetensi yang diperoleh dari asosiasi profesi dan industri memungkinkan program sertifikasi profesi dapat dikembangkan di institusi penyelenggara pendidikan program diploma. Proses sertifikasi profesi diselenggarakan dengan terlebih dahulu mensertifikasi unit yang ditugaskan yang ada dalam institusi melalui proses legal yang ada. Dengan demikian institusi yang memiliki unit sertifikasi terakreditasi dapat menyelenggarakan proses sertifikasi profesi yang relevan.

3.6. Teknik Dacum

Pembuatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada pendidikan vokasi/profesional (diploma dan kepoliteknikan) memerlukan ketelitian dalam mengidentifikasi scientific vision dan market signal sekaligus proses penyusunan bahan kajian dalam urutan yang logis, sehingga seluruh proses merupakan cakupan yang sangat luas dan besar. Oleh karenanya pekerjaan pembuatan kurikulum ini harus diselesaikan dengan jumlah waktu dan sumberdaya yang sangat besar. Pekerjaan dapat diselenggarakan secara paralel maupun serial yang melibatkan beberapa kelompok pakar dalam bidang masing-masing.

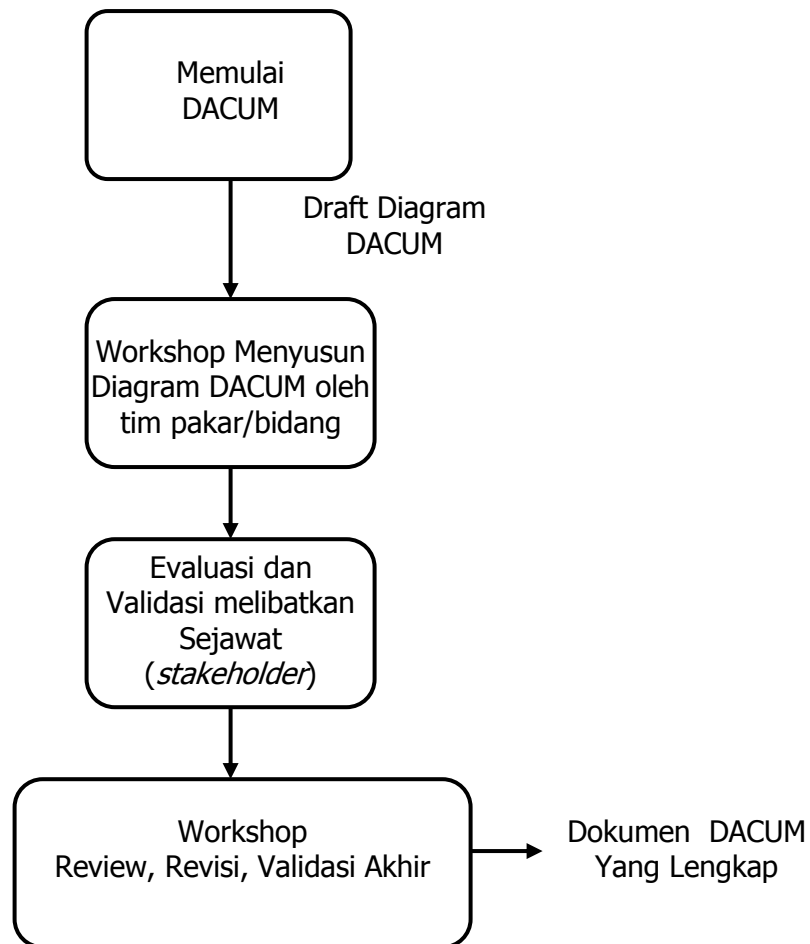
Pada saat para anggota tim penyusun kurikulum, yang merujuk kepada rambu-rambu penyusunan kurikulum pendidikan tinggi seperti Keputusan Mendiknas NO. 232/U/2000 dan N0.045/U /2002 akan memulai menyusun kurikulum bidang studi, ada tiga hal penting dan mendasar yang perlu diperhatikan dan

disepakati oleh tim, yaitu **profesi lulusan** yang akan dihasilkan, **jenjang kualifikasinya**, serta **profil kompetensi profesi** tersebut.

Untuk memperoleh gambaran mengenai ketiga hal penting di atas dibutuhkan survey di lapangan mengenai prospek pekerjaan dan profesi bagi lulusan. Survey dilakukan kepada pengguna lulusan dan kepada para alumni yang sudah bekerja dan berkarya. Langkah ini amat penting dilakukan terutama untuk mendapatkan gambaran nyata kebutuhan masyarakat saat ini serta untuk memprediksi potensi kebutuhan masyarakat di masa depan. Hasil survey yang mewakili dan akurat akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh bidang studi dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan Masyarakat pada 4 - 8 tahun mendatang.

Survey awal untuk menentukan prospek profesi dan jenjang kualifikasi perlu dilakukan oleh tim penyusun kurikulum sebelum penentuan profil lulusan dan kompetensinya. Setelah terdefinisi prospek profesi dan kualifikasi lulusan, selanjutnya diperlukan profil kompetensi atau uraian kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi pekerjaan profesi tersebut. Survey profil kompetensi ini perlu dilakukan dengan cermat dan akan membutuhkan alokasi waktu khusus seperti dengan cara mengadakan workshop. Salah satu metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh profil kompetensi ini adalah metode DACUM (*Developing a curriculum*). Dengan menggunakan pendekatan DACUM dalam menganalisis suatu pekerjaan dapat dikembangkan sebuah profil pekerjaan yang lengkap (termasuk pekerjaan-pekerjaan yang diprioritaskan) dalam waktu relatif singkat. Rangkaian proses DACUM dalam bentuk bagan alir proses ditunjukkan pada diagram di bawah.

Diagram menggambarkan garis besar tahapan proses DACUM yang dimulai dengan workshop penyusunan draft diagram oleh panel DACUM, dilanjutkan dengan evaluasi dan validasi draft diagram oleh sejawat dan kalangan relevan yang lebih luas dari panel DACUM, dan diakhiri oleh review dan revisi.



Gambar 3.2. Bagan Alir Proses DACUM

Proses DACUM sebagaimana diperlihatkan pada diagram di atas akan diulang untuk setiap kurikulum pada masing-masing institusi penyelenggara pendidikan diploma sesuai dengan program studinya.

Keberhasilan proses DACUM bergantung kepada dua faktor kritis yaitu **yang pertama dan yang utama** adalah memiliki **orang-orang yang tepat sebagai anggota tim pelaksana maupun pada panel**. Tim akan mencakup para pakar dalam bidangnya dan akan memanfaatkan kepakaran dari praktisi pada perguruan tinggi yang relevan. **Komponen kedua adalah seorang fasilitator DACUM (tim penyusun kurikulum) yang ahli.**

Tahapan selanjutnya dari proses DACUM adalah tahapan validasi, yaitu memberikan kesempatan kepada kalangan terkait yaitu orang lain di luar panel DACUM yang dinilai mengetahui tugas dan pekerjaan dari lulusan perguruan

tinggi penyelenggara pendidikan diploma tersebut misalnya, supervisor dan instruktur, untuk memberi saran dan komentar pada dokumen dan diagram DACUM yang telah dibuat. Kegiatan ini menjamin supaya tidak ada hal-hal yang ketinggalan.

Untuk keperluan penyusunan kerangka kurikulum pendidikan vokasi/profesional, sistematika dan kedisiplinan dalam penyusunan data akan sangat berpengaruh pada kualitas dari kurikulum yang akan disusun. Hal penting yang perlu diselenggarakan selama proses pengerjaan adalah melakukan pengklasifikasian pada data dan hasil analisis, sehingga dapat diperoleh struktur data yang berurut menurut hirarki urgensi dan prioritas. Dengan demikian dapat segera dilihat data mana yang masuk dalam kelompok utama dan data lain yang masuk sebagai data atau informasi pendukung.

Diakhir dari proses DACUM akan diperoleh profil lulusan dengan dilengkapi kompetensi yang membentuknya yang mencakup Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lain.

3.7. Menyusun KBK pada Pendidikan Program Diploma dan Politeknik

Identifikasi profil lulusan dengan menyertakan sejawat, asosiasi profesi dan asosiasi industri dengan menggunakan metoda DACUM memudahkan dalam menyusun KBK pada pendidikan program diploma. Urutan menyusun kurikulum seperti diperlihatkan diagram alir pada Gambar 3.1 dapat dikembangkan dengan membuat matrik antara kompetensi dengan substansi kajian dan pelajaran. Tabel 3.1 berikut memperlihatkan bagaimanapun hubungan tersebut.

KBK disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi profil lulusan. Berdasarkan profil lulusan ini selanjutnya dapat di turunkan kelompok kompetensi yang sesuai. Selanjutnya masing-masing kompetensi pada kelompok kompetensi diura menjadi elemen kompetensinya, jika lengkap akan terdiri dari lima elemen dan dapat kurang.

Masing-masing elemen kompetensi selanjutnya dilengkapi dengan substansi kajian atau pelajaran yang sesuai untuk mencapainya. Jumlah substansi kajian dan pelajaran berkisar dari satu sampai jumlah tertentu (n). Setiap substansi kajian atau pelajaran hendaknya memberikan informasi kedalaman capaian yang diperlukan untuk menuju pada elemen kompetensi yang didukungnya. Kedalaman dari materi dapat merujuk pada taksonomi Bloom atau ukuran lain yang disepakati. Dengan adanya informasi kedalaman materi ini akan memudahkan menghitung bobot dari setiap bahan kajian dan pelajaran yang diberikan.

KELOMPOK KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	SUBTANSI KAJIAN & PELAJARAN		
		1	2	... n
UTAMA (KKU)	EK. 1			
	EK. 2			
	EK. 3			
	EK. 4	<i>Seluruh isi sesuai dengan elemen kompetensi yang hendak diajarkan</i>		
	EK. 5			
PENDUKUNG (KKP)	EK. 1	<i>Seluruh isi sesuai dengan elemen kompetensi yang hendak diajarkan</i>		
	EK. 2			
	EK. 3	<i>Seluruh isi sesuai dengan elemen kompetensi yang hendak diajarkan</i>		
	EK. 4			
	EK. 5			
LAIN (KKL)	EK. 1			
	EK. 2			
	EK. 3			
	EK. 4			
	EK. 5			

Keterangan :

ELEMEN KOMPETENSI :

EK. 1 = landasan kepribadian;

EK. 2 = penguasaan ilmu dan keterampilan;

EK. 3 = kemampuan berkarya;

EK. 4 = sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

EK. 5= pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Tabel 3.1. Matrik Kelompok Kompetensi dengan Subtansi Kajian

Setiap substansi kajian atau bahan pelajaran berkorelasi dengan jenis (nama) matakuliah yang diberikan. Hubungannya dapat saja bersifat satu-satu, artinya satu bahan kajian atau pelajaran merupakan satu matakuliah, atau relasi yang lain tergantung kebutuhan dan keperluannya. Dapat saja satu mata kuliah memuat lebih dari satu bahan kajian dan pelajaran dengan elemen kompetensi yang sama, lintas elemen, bahkan lintas kelompok kompetensi.

SKS mata kuliah, jika dibutuhkan, dapat dihitung berdasarkan kandungan bahan kajian dan pelajaran yang telah memiliki bobot.

Kurikulum yang disusun dengan cara yang diuraikan di atas menjadi kurikulum yang berdasarkan pada kompetensi dan umum disebut sebagai KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI/ PROFESIONAL

4.1. Implementasi KBK

Penerapan KBK dalam pendidikan program diploma dapat diselenggarakan dengan beragam methoda pembelajaran. Proses pembelajaran akan mengambil peran penting pada keberhasilan implementasi KBK di PT yang menyelenggarakan program diploma. Perubahan yang terjadi dari metode pembelajaran yang baru dengan diterapkannya KBK adalah perubahan dari *Teacher Centered Content-Oriented* ke *Student Centered Learning (SCL)*. Proses perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, dan saat ini diutamakan yang berorientasi pada mahasiswa (*student centered learning*) untuk mencapai kompetensi inovatif yang diharapkan.

Persyaratan lulusan yang kompeten adalah:

- mempunyai kemampuan berlandaskan pada pengembangan kepribadian;
- berkemampuan menguasai kemampuan menerapkan dan menginovasi IPTEKS dan/ atau kesenian dan keterampilan (*know how & know why*);
- berkemampuan berkarya (*know to do*);
- berkemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab (*to be*);
- berkemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan bekerjasama, saling harga menghargai nilai-nilai pluralisme dan kedamaian (*to live together*).

Kemampuan yang harus dimiliki oleh Politeknik atau PT penyelenggara pendidikan diploma dalam menerapkan KBK adalah mampu membentuk dan memberdayakan unit pengembangan pembelajaran berupa kelompok kerja yang kompeten atau sekumpulan orang yang memiliki ide, motivator dan motor penggerak yang didukung oleh :

- kemampuan berkomunikasi secara oral dan/ atau tertulis,
- kemampuan menggunakan logikanya,
- kemampuan menganalisis suatu problema,
- kemampuan bekerjasama dalam tim,
- kemampuan bekerja secara mandiri, dan
- kemampuan dalam penyusunan kurikulum serta pengembangan pembelajaran.

Fungsinya dosen/pengajar menjadi sangat penting dalam keberhasilan implementasi KBK. Dosen harus memiliki 4 kemampuan, yaitu :

- kemampuan untuk memotivasi diri dan mahasiswa;

- kemampuan menguasai subyek kajian untuk berperan sebagai dinamisator dan fasilitator pembelajaran dalam subyek kajian mata kuliah yang diampu;
- memiliki minat dan kemampuan dalam merekonstruksi basis pengetahuan dan metoda pembelajaran dan mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya, merujuk pada kompetensi yang menjadi tujuan mata kuliah tersebut.
- kemampuan menguasai kurikulum dimana dosen harus mengerti dan dapat mengartikulasikan kedudukan dan keterkaitan mata kuliahnya dengan kurikulum program studi dan profesi yang dituju.
- mempunyai kemampuan pedagogi dimana dosen harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dalam subyek kajiannya.

Seorang dosen harus memiliki empat sikap :

- naluri untuk memotivasi mahasiswa ke arah kemajuan melalui perilaku dan sikap ketauladanan dosen;
- minat, yaitu sikap yang mengarahkan kecenderungan dan perhatian pada suatu keadaan;
- niat, yaitu sikap untuk mengerahkan potensi dan kehendak untuk bertindak dan berupaya;
- kiat, yaitu kemampuan untuk menggunakan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam tindakan untuk mencapai tujuan.

Konsep pembelajaran berpusat pada mahasiswa akan tak berdaya jika tidak melibatkan mahasiswa/peserta didik secara aktif. Seorang peserta didik hendaknya didorong untuk mengembangkan kemampuan dasar yang kooperatif dalam proses pembelajaran. Kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik yaitu:

- Minat ternalar terhadap profesi yang dituju.
- Kemampuan untuk belajar mandiri.
- Kemampuan pengembangan kreatifitas dan kritis
- Kemampuan yang terbuka untuk penanganan masalah.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting tentunya mengait pada substansi kajian dan pelajaran. Substansi kajian dan materi pelajaran yang harus diberikan:

- kemampuan subyek kajian yang dilandasi oleh taksonomi pengetahuan dan proses penguasaannya serta keterkaitan subyek kajian;
- kemampuan metodologi yang dilandasi oleh kemampuan menganalisis perilaku kerja;
- kemampuan berkehidupan bermasyarakat yang dilandasi oleh harapan/ekspektasi masyarakat mengenai pengaruh dan perkembangan IPTEKS terhadap hari depan.
- Kemampuan berkomunikasi
- Kemampuan menguasai teknologi informasi

Proses pembelajaran harus merupakan upaya bersama antara dosen dan mahasiswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk ter-'internalisasi'- dalam diri peserta didik dan menjadi landasan untuk menciptakan belajar secara mandiri dan berkelanjutan.

Keterlibatan yang perlu dilaksanakan agar dalam proses pembelajaran terjadi keterlibatan aspek Psikomotorik dan "hands on" yang dapat terdiri dari kegiatan praktikum, kerja praktek, magang dan kegiatan 'experimental', maupun keterlibatan aspek Kognitif yang terdiri dari kegiatan penalaran dan penguasaan intelektualitas secara komprehensif, i keterlibatan aspek Afektif yang terdiri dari tergalinya kepekaan terhadap lingkungan, kematangan emosional. Dengan demikian akan menjadi lulusan yang kreatif dan kritis, mempunyai kemampuan sebagai inovator yang kreatif.

Selanjutnya harus dirancang proses pembelajaran kreatif yang mampu mendukung implementasi KBK. Proses pembelajaran seharusnya dilakukan melalui proses:

- proses berbagi dan mengolah informasi yang dapat dilakukan melalui kuliah, diskusi, seminar, studi kasus, tugas praktikum, tugas penelitian;
- proses internalisasi yang dilakukan melalui latihan, responsi, tugas pekerjaan rumah, tutorial, diskusi sejawat dan kerja kelompok;
- proses mekanisme balikan (feedback mechanism) yang dapat dilakukan melalui pembahasan hasil internalisasi, catatan evaluasi pada lembar hasil tugas, pengumuman dan komentar;

Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dinamis, dialogis dan efektif pada model pembelajaran SCL adalah:

- Memahami tujuan dan fungsi belajar di mana seorang dosen perlu memahami konsep-konsep mendasar dan cara belajar sesuai dengan pengalaman mahasiswa serta memusatkan pembelajaran pada mahasiswa.
- Mengenal mahasiswa sebagai individu beserta perbedaan kemampuannya, untuk menentukan berbagai metode dan strategi untuk mendorong kreativitas.
- Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang serta memanfaatkan organisasi kelas agar mahasiswa dapat saling membantu dalam melakukan tugas belajar tertentu.
- Mengembangkan kreativitas dan kemampuan berfikir kritis dan pemecahan masalah
- Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta memberikan muatan nilai, etika, estetika, dan logika.
- Memberikan umpan balik yang baik untuk mendorong kegiatan belajar.
- Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL, di antaranya adalah:

- *Small Group Discussion*
- *Role-Play & Simulation*
- *Case Study*
- *Discovery Learning (DL)*
- *Self-Directed Learning (SDL)*
- *Cooperative Learning (CL)*
- *Collaborative Learning (CbL)*
- *Contextual Instruction (CI)*
- *Project Based Learning (PjBL)*
- *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*

Penerapan beberapa metode pembelajaran tersebut sangat tergantung pada kompetensi yang akan dicapai sehingga dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.

4.2. Evaluasi

Langkah terakhir dari KBK adalah menyiapkan proses evaluasi. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui: (i) evaluasi hasil yang dapat terdiri dari 'assessment' berdasar test dan tanpa test, (ii) evaluasi proses yang dapat terdiri 'assessment' sejawat dan survai pendapat mahasiswa.

Evaluasi pembelajaran diantaranya terdiri dari dua macam yaitu Evaluasi Hasil dan Evaluasi Proses. Evaluasi hasil terdiri dari *assessment* berdasarkan test, tanpa test dan *evaluasi diri* sedangkan Evaluasi Proses dapat terdiri dari *Assessment* Sejawat dan survai pendapat mahasiswa.

Disamping itu sistem evaluasi hasil pembelajaran juga dapat dilakukan antara lain dengan:

- Mengukur semua aspek pembelajaran meliputi proses, kinerja dan produk dengan tekanan pada kemampuan mendemonstrasikan kompetensi yang diharapkan
- Melaksanakan penilaian selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung
- Menggunakan berbagai cara penilaian dan berbagai sumber
- Menjadikan tes hanya sebagai salah satu alat pengumpul data penilaian
- Menilai tugas-tugas yang diberikan yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keahlian mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

- Menilai keterlibatan dan kontribusi mahasiswa dalam diskusi kelompok, kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, isi laporan diskusi kelompok diukur dengan alat ukur kategori non-tes, seperti daftar checklist, performance appraisal, skala (Likert, Gussman, dll), participation list, portofolio, dan sebagainya.

BAB V PENUTUP

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Program Diploma dan Politeknik ini dimaksudkan sebagai rujukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menyusun atau menyempurnakan kurikulum pada pendidikan vokasi/ profesional yang benar sesuai dengan yang dimaksud dalam Kepmen Diknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002.

Dalam menyelenggarakan penyusunan atau penyempurnaan kurikulum sangat penting ditekankan kembali untuk menyertakan sejawat, masyarakat terkait, profesi, alumni dan pihak pengguna agar diperoleh struktur kurikulum yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan. Disamping itu diskusi yang mendalam juga penting untuk *re-invent* kurikulum bagi program studi.